

INVESTASI, EKSPOR DAN MASALAH DE-INDUSTRIALISASI DI INDONESIA*

Anton Agus Setyawan¹

Fatchurrohman¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

There are two constraints in the process of economic recovery in Indonesia. First, investment rate is decreasing in the last five years. This matter happens due to the bad investment climate in Indonesia. Second, slow growth of export rate in Indonesia. At the present, investment rate in Indonesia is only 22 percent of GDP, while the ideal rate is 30 percent of GDP. Another problem, which may be interrupting the economic recovery, is de-industrialization. The sign of de-industrialization occur by relocation phenomena of FDI from Indonesia. This research analyze the effects of direct investment and export to GDP. The tool of analyses of this research is econometric model known as Error Correction Models. The results shows that in a long term and short term, export and direct investment do not have a significant effect to GDP. It shows that Indonesia do not have a clear policy about export and investment. The policy implications of this research are government should have a deregulation policy in the industry and recover investment climate.

Keywords: export, direct investment, GDP, Error Correction Model, deregulation.

PENDAHULUAN

Isu tentang investasi dan ekspor adalah masalah ekonomi yang krusial dalam pembahasan pemulihan ekonomi Indonesia. Keterpurukan Indonesia dalam krisis ekonomi yang berlarut-larut, salah satunya disebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengembalikan tingkat investasi seperti sebelum krisis. Saat ini tingkat investasi Indonesia hanya sebesar 22 persen dari PDB, sementara pada masa sebelum krisis bisa mencapai 30 persen dari PDB (Sadli, 2004). Berdasarkan asumsi dalam APBN 2004 pertumbuhan ekonomi tahun 2004 diperkirakan sebesar 4,8 persen. Pertumbuhan ekonomi

sebesar ini tidak cukup untuk mengatasi angka pengangguran terbuka sebesar 9,1 persen dari total angkatan kerja. Selain itu angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia didominasi oleh sektor konsumsi yang tidak mempunyai efek pengganda besar bagi perekonomian (Zulkifliemansyah, 2004).

Pemulihan ekonomi sebenarnya akan lebih ditentukan oleh pemulihan investasi. Dalam teori neo-klasik selalu diajarkan bahwa untuk membangun kinerja perekonomian suatu negara maka dibutuhkan akumulasi kapital (Kuncoro, 2000). Negara berkembang lebih memerlukan investasi terutama asing karena pada umumnya tingkat tabungan domestik di negara

* Paper ini telah disampaikan dalam Seminar Nasional Akademik Tahunan Ekonomi I "Perubahan Struktural dalam Rangka Penyehatan Ekonomi" kerjasama Pascasarjana UI dan ISEI, Jakarta 8-9 Desember 2004.

berkembang rendah (Sadli, 2002). Sebelum krisis angka tabungan domestik di negara-negara Asia Tenggara pada umumnya berkisar antara 30 persen dari PDB. Saat ini angka tabungan domestik di Indonesia berkurang karena pada masa lalu tingginya angka disebabkan oleh tingginya angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, pada saat pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4 persen tentu saja angka tabungan domestik juga mengalami penurunan.

Dalam sebuah sistem perekonomian terbuka angka ekspor juga memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi. Ekspor terkait dengan kebijakan sektor riil suatu negara. Berdasarkan data dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan (2004), Indonesia mengalami kenaikan angka ekspor sebesar 6,78 persen. Ekspor dari sektor migas sendiri mengalami kenaikan sebesar 12,64 persen sementara untuk ekspor non migas kenaikan yang terjadi adalah sebesar 5,21 persen.

Kinerja makro ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Stabilisasi indikator makro ekonomi bisa dilakukan pemerintah dengan baik. Angka inflasi pada tahun 2003 bisa ditekan sehingga hanya mencapai 6 persen, sementara nilai tukar Rupiah bertahan pada level Rp 8.600,00. Namun demikian, sektor riil justru mengalami masalah serius. Realisasi investasi langsung PMA terus mengalami penurunan. Data dari Asian Development Bank menunjukkan bahwa pada tahun 2002 penurunan angka realisasi investasi adalah sebesar US\$ 2.251 juta. Ini dapat diartikan investor justru melakukan relokasi keluar dari Indonesia.

Paper ini akan menganalisis keterkaitan antara GDP, investasi langsung dan ekspor. Tujuan dari paper ini, *pertama*, menganalisis pengaruh investasi langsung terhadap GDP. Hal ini untuk melihat bagaimana kondisi aktual iklim investasi di Indonesia. *Kedua*, menganalisis pengaruh ekspor terhadap GDP. Kontribusi ekspor terhadap GDP akan memberikan gambaran kondisi sektor riil di Indonesia.

Ketiga, menganalisis apakah fenomena de-industrialisasi yang dikhawatirkan beberapa pengamat ekonomi (lihat Zulkifliemansyah, 2004) adalah sesuatu yang nyata dihadapi Indonesia. Analisis yang digunakan adalah model ekonometri dengan model *Error Correction Model* (ECM).

INDUSTRIALISASI DAN PENINGKATAN EKSPOR

Industrialisasi adalah sebuah pilihan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lestari (*sustainable*). Industrialisasi dianggap mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena dalam sektor industri nilai tambah ekonomi yang tinggi akan selalu ada. Pilihan strategi industrialisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah:

1. Promosi ekspor. Strategi ini dilakukan dengan membangun industri-industri yang berorientasi ekspor. Pembangunan industri yang strategis ini mengacu pada permintaan efektif di pasar global. Artinya pilihan untuk membangun suatu industri terkait dengan apakah produk yang dihasilkan mampu diserap pasar internasional.
2. Substitusi impor. Substitusi impor merupakan suatu alternatif strategi pembangunan yang mengutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa menambah ekspor (Rahayu dan Soebagiyo, 2004). Dalam strategi substitusi impor, pemerintah sebuah negara lebih memilih untuk membangun industri yang menghasilkan produk-produk yang selama ini harus diimpor dari negara lain.

Kebijakan industrialisasi bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Resiko kegagalan dari kebijakan ini sangat besar, terutama apabila sebuah negara gagal mengenali potensi industrinya. Apabila sebuah negara gagal mencari benang merah yang menghubungkan sektor tradisionalnya (sektor pertanian) dengan

sektor modern (sektor industri) maka kegagalan industrialisasi sudah berada di depan mata. Kegagalan untuk mensinergikan sektor tradisional dengan sektor modern akan memunculkan dualisme ekonomi seperti dikemukakan Boeke (lihat Koencoro, 2000). Dualisme ekonomi adalah suatu keadaan dimana sektor modern dan sektor tradisional berjalan sendiri-sendiri tanpa ada sinergi diantara keduanya. Artinya sektor pertanian di sebuah negara tidak mendukung sektor industrinya. Gejala yang sering muncul sebagai akibat dualisme ekonomi adalah adanya pengangguran struktural dan munculnya sektor informal. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami dualisme ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dari maraknya kemunculan sektor informal di negara ini. Dampak negatif dari dualisme ekonomi adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi dari negara bersangkutan. Selain itu, dualisme ekonomi mengakibatkan adanya disparitas dalam distribusi pendapatan (Garcia-Penalosa dan Turnovsky, 2004).

Thailand adalah salah satu negara yang dianggap berhasil melakukan sinergi antara sektor pertanian dengan sektor industri. Negara ini mampu memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sebelum krisis ekonomi tahun 1998. Industri manufaktur di Thailand sebelum tahun 1997 didominasi oleh industri otomotif yang tidak memiliki keterkaitan dengan potensi negara ini yaitu di bidang pertanian. Kesalahan investasi yang dilakukan ini harus ditebus dengan mahal, yaitu kebangkrutan industri manufaktur di Thailand. Pemerintah Thailand kemudian melakukan reformasi dan penyesuaian mendasar di bidang manufaktur yang ternyata berhasil dengan baik (Dollar dan Hallward-Driemeier, 2000). Thailand menyadari bahwa potensi mereka adalah dalam sektor pertanian, mereka kemudian mengubah orientasi industrinya menjadi agrobisnis. Keberhasilan ini menjadikan negara ini sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang paling cepat pulih dari krisis. Bahkan, berdasarkan hasil survei dari UNCTAD tahun 2004, Thailand adalah negara

tujuan investasi ketiga di Asia setelah RRC dan India.

Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah ekonomi yang serius yaitu lambannya pertumbuhan ekspor. Pertumbuhan ekspor yang lamban di Indonesia salah satunya disebabkan karena ketidakjelasan kebijakan industrialisasi. Sebagai buktinya, meskipun saat ini semua indikator ekonomi makro menunjukkan adanya perbaikan, namun sektor riil tidak mampu pulih. Bahkan ada gejala de-industrialisasi. Ekspor Indonesia sebagian besar masih bergantung dari minyak bumi dan gas. Selain itu ekspor non-migas yang menjadi andalan adalah komoditas elektronik, kayu lapis, karet dan tekstil. Adapun negara tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korsel, China dan Malaysia. Dari sektor yang menjadi andalan ekspor ternyata juga tidak menunjukkan keterkaitan dengan potensi Indonesia yaitu di sektor pertanian dan perikanan. Apabila tidak ada perbaikan maka sulit mengharapkan pemulihan sektor riil dengan cepat.

Kebijakan industrialisasi yang disarankan adalah membangun industri yang sesuai dengan potensi ekonomi Indonesia. Jawaban yang kemudian muncul adalah membangun industri yang terkait dengan sektor pertanian. Akan tetapi, membangun sebuah industri perlu memperhatikan beberapa hal, pertama, apakah produk yang dihasilkan mampu diserap oleh pasar internasional. Tidak ada gunanya mengembangkan sebuah industri apabila produk yang dihasilkan tidak bisa dijual. Kedua, apakah industri yang baru dibangun memerlukan perlindungan. Memberikan proteksi terhadap sebuah industri adalah bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Namun demikian, trend yang terjadi dalam perdagangan internasional saat ini adalah pemberian proteksi pada industri tertentu yang dianggap strategis oleh negara bersangkutan. Kita bisa melihat kegagalan perundingan WTO di Cancun beberapa waktu lalu adalah implikasi dari masalah proteksi perdagangan ini. Riset empirik yang dilakukan Konigs dan Vandenbussche

(2004) menunjukkan bahwa poteksi antidumping memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri yang bersangkutan. Setting penelitian ini adalah pada industri manufaktur di beberapa negara Eropa. Riset lain yang dilakukan oleh Zhu dan Trefler (2004) memperkuat perlunya proteksi industri yang masih infant di negara berkembang karena negara berkembang secara teknologi tertinggal jauh dari negara maju. Ketiga, keterkaitan dengan kebijakan investasi. Kebijakan industrialisasi juga terkait dengan kebijakan investasi di sebuah negara. Pentingnya kebijakan investasi adalah untuk membangun mitra strategis dengan investor. Penelitian yang dilakukan Blonigen, Ellis dan Fausten (2004), menunjukkan bahwa pengelompokan industri PMA tergantung dari siapa mitra strategisnya.

INVESTASI DAN PDB DI NEGARA BERKEMBANG

Menurut Dornbusch (1993) ada lima prinsip yang mempengaruhi daya tarik investasi di negara berkembang, yaitu *pertama*, kesempatan. Tidak semua negara mempunyai kesempatan untuk menjadi daerah tujuan investasi. Beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin yang tergolong miskin, tidak mempunyai sumber daya dan stabilitas kondisi politik tidak akan menarik investor. *Kedua*, prospek. Sebuah negara akan menjadi tujuan investasi apabila prospek ekonomi negara tersebut bisa diandalkan. Kotler dan Kertajaya (2000) mengemukakan sebuah contoh transformasi struktur ekonomi Jepang pasca PD II yang berubah dari pertanian menjadi industri manufaktur dengan biaya rendah. Model Jepang ini kemudian diadopsi oleh negara-negara lain di Asia seperti Korsel, Taiwan, Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Model pembangunan negara-negara industri baru ini yang menjadi penyebab mereka mempunyai prospek ekonomi yang lebih baik.

Ketiga, koordinasi. Pasca krisis ekonomi pemerintah belum mampu memberikan sinyal positif kepada pengusaha yang terpaksa

“memarkir” modalnya di luar negeri untuk kembali ke tanah air. Sebuah usaha membangun kondisi politik dan kemandirian yang stabil serta eliminasi ekonomi biaya tinggi bisa menjadi sebuah sinyal bagi proses koordinasi ini. *Keempat*, kebijakan pemerintah dan regulasi. Kebijakan pemerintah dalam investasi merupakan hal yang mutlak diperlukan. Menurut Hamid (1999) kebijakan pemerintah dalam perekonomian mutlak diperlukan, namun fleksibel dan perlu dukungan institusi. Salah satu keluhan investor saat ini adalah ketidakjelasan regulasi pemerintah baik pusat maupun daerah. *Kelima*, kondisi keuangan. Kondisi keuangan ini terkait dengan tiga aspek penting yaitu utang pemerintah, masalah APBN dan kondisi sektor keuangan.

Investasi (asing) di negara berkembang berkembang diperlukan karena masalah umum yang terjadi di negara berkembang adalah angka pengangguran yang tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan dan ketidakseimbangan struktural (Koncoro, 2000). Investasi akan mendorong pertumbuhan PDB. Investasi yang diharapkan adalah investasi langsung (*Foreign Direct Investment* atau FDI) karena investasi ini memberikan dampak berupa pembukaan lapangan kerja baru sekaligus adanya kemungkinan transfer teknologi. Indonesia sejak masa orba berusaha untuk mengundang investor asing demi kepentingan pertumbuhan ekonomi. Menurut Chandra (1996) ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi langsung, yaitu permintaan, perubahan struktur perekonomian, kebijakan ekonomi makro dan ekonomi daerah, akses terhadap biaya faktor yang lebih rendah, akses terhadap SDM dan *local sourcing* dan akses terhadap lokasi input produksi dan penghematan eksternal. Pemerintah harus memfokuskan perhatiannya pada faktor-faktor tersebut.

Investasi terdiri dari dua jenis, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio adalah penanaman modal melalui bursa saham. Investasi jenis ini tidak mempunyai *multiplier effect* yang luas, karena

perpindahan modal hanya terjadi di bursa saham dan tidak berimplikasi terhadap sektor riil. Selain itu, investasi jenis ini rentan terhadap perubahan. Aliran modal masuk dan keluar bisa terjadi setiap saat. Investasi langsung adalah proses investasi dimana penanaman modal dilakukan dengan membangun pabrik di negara tujuan investasi. Investasi langsung mempunyai *multiplier effect* luas, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan dan Bergeraknya industri pendukung. Sejak krisis ekonomi melanda Indonesia lima tahun lalu, terjadi penurunan realisasi investasi di Indonesia, terutama investasi langsung.

mengundang investor asing bisa berdampak negatif. Hal ini terkait dengan kepentingan nasional negara bersangkutan. Kelompok ekonom strukturalis percaya bahwa investasi asing yang berarti aliran modal masuk ke Indonesia lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan nilai repatriasi yang selisihnya sering disebut dengan *net transfer* (Arief, 2001). Pada tabel 1 berikut ini adalah perkembangan investasi di Indonesia dari tahun 1998 sampai tahun 2003.

Tabel 1 menunjukkan penurunan angka persetujuan investasi di Indonesia dalam periode

Tabel 1. Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal 1997-2003

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Nilai (Rp. Milyar)	Proyek	Nilai (US \$ juta)
1997	723	119.877,2	781	33.788,8
1998	327	57.973,6	1.034	13.649,8
1999	237	53.540,7	1.177	10.884,5
2000	392	93.897,1	1.541	16.075,9
2001	264	58.816	1.334	15.056,3
2002	188	25.230,5	1.151	9.795,4
2003	181	48.484,8	1.024	13.207,2

Sumber: Pusat Data Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003,
www.dprin.go.id

Realisasi investasi akan menyelesaikan salah satu masalah krusial dalam perekonomian yaitu, penyediaan lapangan kerja. Dalam sebuah artikel utama majalah *Far Eastern Economic Review* edisi 1 Agustus 2002 diulas masalah pengangguran di Indonesia. Dalam artikel itu disebutkan bahwa untuk mengatasi masalah pengangguran, maka dibutuhkan angka pertumbuhan yang tinggi. Tentu saja, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah dengan kontribusi besar dari ekspor dan angka investasi.

Orientasi pemulihan ekonomi dengan mengejar peningkatan angka investasi bukannya tanpa kritik. Beberapa ekonom terutama mereka yang berasal dari mazhab strukturalis menganggap keputusan untuk

krisis ekonomi sampai sekarang. Penurunan angka ini terjadi baik pada penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, persetujuan investasi mengalami kenaikan namun demikian belum bisa kembali seperti persetujuan investasi sebelum krisis.

Investasi langsung akan berpengaruh terhadap penyediaan lapangan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Lipsey dan Sjöholm (2004) dengan *setting* industri manufaktur di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perusahaan manufaktur PMA lebih diminati oleh tenaga kerja Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur PMA memberikan tingkat upah yang lebih tinggi dan memberikan

penghargaan terhadap tingkat pendidikan karyawannya daripada perusahaan manufaktur PMDN. Penelitian lain yang dilakukan Markusen (2001) menyimpulkan bahwa proses investasi langsung dalam bentuk MNC (*multi national company*) atau perusahaan multinasional mempunyai dampak positif terhadap negara berkembang berupa transfer teknologi dan penghargaan terhadap hak cipta intelektual.

Maraknya relokasi industri negara maju ke negara berkembang dalam wujud investasi langsung di negara berkembang memicu munculnya perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional tersebut ada kalanya melakukan kerja sama dalam bentuk *joint venture* dengan mitra perusahaan lokal. Ada beberapa faktor sukses *joint venture* perusahaan multi nasional dengan perusahaan lokal yaitu, hubungan antar perusahaan yang bermitra, konflik antar perusahaan yang bermitra, komitmen antar perusahaan yang bermitra, kinerja perusahaan *joint venture* dan kepuasan perusahaan induk (Demirbag dan Mirza, 2000).

Secara teoritis investasi akan mempengaruhi pendapatan nasional sebuah negara. Pendapatan nasional suatu negara biasanya diukur dengan PDB atau GDP. Komponen lain dari GDP adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah apabila asumsi yang digunakan adalah sistem perekonomian tertutup. Bila asumsi yang digunakan adalah sistem perekonomian terbuka maka ditambah dengan angka ekspor dikurangi angka impor. Fenomena di negara berkembang yang mempunyai beberapa aspek khusus menyebabkan kritik terhadap indikator ekonomi dengan GDP ini. Kasliwal (1995) mengemukakan sebuah ukuran yang lebih tepat untuk menghitung pendapatan nasional negara berkembang, yaitu dengan formula $NI = GDP - (B + K + P + A)$. NI adalah pendapatan nasional dalam harga pasar. Dalam formula diatas GDP konvensional masih harus dikurangi dengan angka pembayaran bunga hutang luar negeri (B), keuntungan yang dibawa investor asing ke luar

negeri (K), penyusutan (P) dan pembayaran cicilan pokok hutang luar negeri (A).

H1 Investasi langsung berpengaruh positif terhadap PDB riil.

KINERJA EKSPOR INDONESIA

Peran ekspor dalam perekonomian sebuah negara sangat penting. Ekspor suatu negara menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar ekspor Indonesia ke pasar internasional didominasi oleh minyak mentah dan bahan tambang serta berbagai komoditi primer lainnya (Gustaf, 1987). Namun demikian negara ini masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ekspornya dengan meningkatkan ekspor non-migas.

Sebuah sistem perekonomian terbuka berarti memberikan ruang bagi sebuah negara untuk melakukan perdagangan internasional. Negara berkembang mengalami keterbatasan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini dikarenakan rendahnya angka tabungan domestik di negara berkembang (Sadli, 2002). Oleh karena itu ekonom neoklasik menyarankan agar negara berkembang mengubah strategi pembangunannya dari *inward orientation* menjadi *outward orientation* (Kuncoro, 2000). Alasannya karena pasar global lebih menjanjikan dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan nasional negara berkembang dengan syarat mereka mampu bersaing dalam perekonomian global. Hal ini yang kemudian menjadi dasar kebijakan orientasi ekspor di negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Perkembangan ekspor Indonesia dalam dua tahun terakhir cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan dari ekspor nasional pada 2003. Dalam sistem perekonomian terbuka, ekspor mempunyai dua akibat langsung, *pertama*, meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan GDP pada perekonomian nasional dan pertumbuhan PDRB pada perekonomian daerah). *Kedua*,

menurunnya angka pengangguran. Ekspor adalah akibat dari suatu proses produksi. Kelangsungan proses produksi membutuhkan kombinasi faktor produksi. Kontribusi terbesar faktor produksi terhadap suatu proses produksi adalah dari faktor produksi tenaga kerja (McEachern, 2000). Tabel 2 menggambarkan perkembangan ekspor Indonesia tahun 2002-2003.

masing-masing sektor itu adalah sektor industri pengolahan. Hal ini dikarenakan kandungan teknologi dan daya serap tenaga kerja dari sektor ini tinggi.

Pasar ekspor yang masih terbuka adalah sebuah peluang bagi para pelaku ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, buruknya kebijakan ekspor pemerintah dan rendahnya daya saing Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekspor

Tabel 2. Perkembangan Ekspor Indonesia Tahun 2002-2003
(dalam US\$ juta)

Ekspor	2002	2003	Perub.
Migas	12.112,7	13.643,6	12,64
Non-Migas	45.046,1	47.390,9	5,21
Total	57.158,8	61.034,5	6,78

Sumber: Pusat data Departemen Perindustrian dan Perdagangan 2003,
www.dprin.go.id

Data tersebut memberikan informasi kepada kita tentang perkembangan ekspor Indonesia dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekspor non-migas hanya sebesar 5,21 persen dari tahun 2002 ke tahun 2003. Sementara, ekspor migas mengalami pertumbuhan sebesar 12,64 persen. Adapun total ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 6,78 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia terhadap migas masih tinggi. Padahal, negara ini mulai mengalami pergeseran dari eksportir minyak menjadi importir minyak. Oleh karena itu, meskipun saat ini terjadi kenaikan harga minyak sampai dengan US\$ 50 per barrel tidak akan memberikan *windfall profit* bagi negara ini.

Ketergantungan ekspor migas harus digantikan oleh perhatian kepada ekspor non migas. Selama ini komoditas ekspor non-migas yang masih menjadi andalan adalah ekspor tekstil untuk sector industri, udang untuk sector pertanian dan batubara untuk sector pertambangan (Deperindag, 2003). Namun demikian, nilai tambah ekonomi tertinggi dari

non-migas sangat lamban. Indonesia bisa mengikuti strategi ekspor perusahaan kecil-menengah di Korsel yang mengutamakan orientasi pasar agar bisa bersaing di pasar internasional (Kwon dan Hu, 2000). Pengukuran orientasi pasar yang dilakukan UKM Korea adalah dengan mengaktifkan *market intelligence* dan meningkatkan respon pasar.

H2 Ekspor berpengaruh positif terhadap PDB riil.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data indikator makro ekonomi Indonesia yang dilaporkan oleh *Asian Development Bank* dalam *annual report* tahun 2003. Data yang dianalisis adalah tingkat GDP riil, Ekspor dan Investasi Langsung di Indonesia dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2002.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model ECM (*Error Correction Model*). Pilihan

alat analisis ini dilakukan untuk menghindari fenomena *spurious regression* atau regresi lancung (Gujarati, 2003; Thomas, 1997). Menurut Granger dan Newhold (1974), regresi lancung ditandai dengan tingginya nilai koefisien determinasi dengan disertai oleh nilai statistik Durbin-Watson (DW) yang rendah. Konsekuensinya model regresi yang dipilih kehilangan kemampuan untuk digunakan dalam peramalan.

Insukindro (1991) menyarankan dua pendekatan yang harus dilakukan untuk menghindari regresi lancung, yaitu *pertama*, tanpa uji stasionaritas. Apabila peneliti memilih cara ini maka model yang digunakan adalah model ekonometri dinamik, misalnya PAM (*Partial Adjustment Methods*) atau ECM (*Error Correction Model*). *Kedua*, dengan melakukan uji stasionaritas. Pengujian stasionaritas lazimnya menggunakan uji statistik *Dickey-Fuller* (DF) dan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Dalam paper ini peneliti menggunakan cara pertama, yaitu tanpa melakukan pengujian stasionaritas. Oleh karena itu, kemudian disusun sebuah model dinamik dengan ECM, berikut ini:

$$\Delta \text{Log GDP} = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta \text{Log Eksp} + \gamma_2 \Delta \text{Log Invest} + \gamma_3 \text{Log Eksp}_{t-1} + \gamma_4 \text{Log Invest}_{t-1} + \gamma_5 \text{ECT}_{t-1} \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan ECM di atas menjelaskan bahwa perubahan GDP ($\Delta \text{Log GDP}$) masa sekarang dipengaruhi oleh perubahan Ekspor ($\Delta \text{Log Eksp}$) dan perubahan investasi langsung ($\Delta \text{Log Invest}$) dan kesalahan ketidakseimbangan atau komponen koreksi kesalahan periode sebelumnya (ECT_{t-1}).

Model di atas juga diuji dengan pengujian autokorelasi dengan uji Breusch-Godfrey (BG). Adapun persamaan *auxiliary regression* dari BG test itu adalah:

$$e_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{Log Eksp} + \alpha_3 \text{Log Invest} + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + \rho_3 e_{t-3} + \rho_4 e_{t-4} + \varepsilon_t \dots\dots\dots (2)$$

Dari persamaan tersebut akan diperoleh koefisien determinasi (R^2). Selanjutnya nilai R^2 dikalikan dengan $(n-\rho)$ dan hasilnya dibandingkan dengan tabel Chi-Square. Jika $(n-\rho) R^2$ hasilnya lebih dari nilai Chi-Square dari tabel maka, paling tidak salah satu nilai ρ signifikan secara statistik berbeda dari nol (Gujarati, 2003).

Model ekonometri yang baik juga harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model ini maka digunakan uji White, yang menggunakan persamaan *auxiliary regression* berikut ini:

$$e_t^2 = \alpha_1 + \alpha_2 \text{Log Eksp} + \alpha_3 \text{Log Invest} + \alpha_4 \text{Log Eksp}^2 + \alpha_5 \text{Log Invest}^2 + \alpha_6 \text{Log Ekspor Log Invest} + v_t \dots\dots\dots (3)$$

Dari persamaan di atas akan diperoleh koefisien determinasi (R^2) yang dikalikan dengan jumlah *observed* (n). Selanjutnya $n \cdot R^2$ dibandingkan dengan tabel Chi-Square. Apabila $n \cdot R^2$ lebih besar dari nilai Chi-Square yang ditentukan maka model terkena masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika $n \cdot R^2$ lebih kecil dari nilai Chi-Square yang ditentukan maka model terbebas dari masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2003).

HASIL ANALISIS DATA

Hasil analisis data dari model ECM penelitian ini diringkas dalam tabel 3.

Hasil pengujian dengan model ECM menunjukkan bahwa perubahan GDP masa sekarang hanya dipengaruhi oleh perubahan ekspor. Sedangkan perubahan nilai investasi langsung, meskipun signifikan pada $\alpha 5\%$, namun koefisien regresinya bertanda negatif. Indikator lain, ternyata nilai ECT_{t-1} atau

Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Model ECM

Variabel	Koefisien Regresi (B)	t
Intersept	0,120	0,513
Δ Log Eksp	0,277	1,833**
Δ Log Invest	-0,063550	-3,282*
Log Eksp _{t-1}	-0,019722	-0,257
Log Invest _{t-1}	-0,009726	-0,140
ECT _{t-1}	0,043349	0,708

$R^2 = 0,583$

F hit = 3,354**

Keterangan: ** = signifikan pada α 10%

* = signifikan pada α 5%

kesalahan ketidakseimbangan ternyata tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti model ECM ini tidak bisa digunakan untuk peramalan.

Selanjutnya model ini akan diuji dengan BG test untuk mendeteksi apakah model tersebut terkena masalah autokorelasi. Hasil pengujian dari BG test seperti yang disarankan oleh Gujarati (2003) adalah menghasilkan koefisien determinasi *auxiliary regression* (R^2) sebesar 0,375. Maka dari model ini dapat dihitung nilai $(n-r) R^2$ sebesar $(13-4) \times 0,375 = 3,375$. Selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai Chi-Square dengan probabilitas 0,05 dari tabel yaitu sebesar 9,48733. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan nilai $(n-r) R^2$ lebih kecil daripada χ^2 , maka H_0 diterima. Kesimpulannya model ini tidak terkena masalah otokorelasi.

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji White dengan persamaan (3). Persamaan (3) menghasilkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,239. Nilai ini kemudian dikalikan dengan jumlah *observed* (n) sebesar 17, hasilnya adalah 4,063. Jumlah ini selanjutnya dibandingkan dengan tabel χ^2 (*Chi Square*). Tabel χ^2 (*Chi Square*) dengan df 5 persen adalah sebesar 11,0705. Nilai $n.R^2$ ternyata juga lebih kecil dibandingkan dengan nilai tabel χ^2 . Maka dapat disimpulkan bahwa model ini juga tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

PEMBAHASAN

Hipotesis penelitian ini yang menyatakan bahwa investasi langsung berpengaruh positif terhadap GDP dan ekspor berpengaruh positif terhadap GDP tidak didukung. Model ECM yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini tidak mampu menjelaskan pengaruh ekspor dan investasi langsung serta masalah ketidakseimbangan, terhadap GDP dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Model penelitian ini juga terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Model penelitian ini sebenarnya tidak memenuhi syarat model ekonomi yang baik seperti dikemukakan oleh Harvey (1991) dalam Insukindro (1991), yaitu data *admissibility*. Artinya model ini tidak tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi besaran-besaran ekonomi yang menyimpang dari kendala ekonomika, misalnya munculnya nilai negatif yang tidak sesuai dengan teori.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Prihadi Utomo (2001) yang juga menyimpulkan bahwa ekspor ternyata tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian dengan tersebut model ECM yang digunakan juga tidak mampu memprediksi hubungan antara ekspor dengan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana menjelaskan hal ini?

Hasil penelitian ini sebenarnya justru sesuai dengan kenyataan saat ini ada di Indonesia. Dalam uraian pada awal paper ini yang disertai

dengan sajian data sudah dibahas tentang buruknya kebijakan ekspor di Indonesia. Hal ini ditandai dengan lambannya pertumbuhan ekspor selama 6 tahun terakhir. Angka pertumbuhan ekspor rata-rata hanya 7 persen per tahun. Iklim investasi di Indonesia yang juga buruk merupakan penjabar dari gagalnya kemampuan prediksi dari model ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh UNCTAD (*United Nation Commission For Trade and Development*) mengemukakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi daerah utama tujuan investasi. Dalam riset tersebut dikatakan bahwa penyebab utama penurunan daya tarik investasi Indonesia adalah masalah ekonomi biaya tinggi karena praktek korupsi.

kemandegan sektor riil semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh adalah maraknya relokasi beberapa perusahaan multinasional dari Indonesia. Sony dan Gillete adalah dua nama perusahaan multinasional yang memutuskan untuk meninggalkan Indonesia karena buruknya iklim investasi di negeri ini. Selain itu, ditutupnya puluhan perusahaan tekstil di beberapa kawasan Industri di Indonesia juga memperkuat dugaan adanya de-industrialisasi.

Mandegnya industri nasional dapat dilihat dari dua hal, pertama, iklim investasi yang tidak kondusif. Dalam usaha menarik investor asing ini, pemerintah dihadapkan pada dua masalah sekaligus, yaitu masalah internal dan eksternal.

Tabel 4. Peringkat Negara Paling Menarik untuk Berinvestasi

	Afrika	Asia	Amerika Latin	Negara Berkembang	Eropa Timur dan Tengah	Negara Maju
Peringkat 1	Afrika Selatan	China	Mexico	China	Republik Ceko Polandia	USA
Peringkat 2	Angola Tanzania	India	Brazil Chili	India		Inggris
Peringkat 3		Thailand		Thailand	Rumania Rusia	Kanada Perancis

Sumber: Survey FDI UNCTAD (2004)

Tabel 4 menunjukkan negara-negara yang saat ini menjadi tujuan investasi. Tiga besar di kawasan Asia ternyata saat ini diduduki oleh RRC, India dan Thailand. Terkait dengan pemberantasan korupsi di RRC mendapat perhatian dari dunia internasional karena komitmen negara Tirai bambu itu terhadap pemberantasan kejahatan korupsi sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap para koruptor.

Ketidakmampuan model ECM dari penelitian ini dalam menjelaskan fenomena ekspor dan investasi di Indonesia merupakan gejala awal dari de-industrialisasi. Gejala ini pertama kali dikemukakan oleh para pengusaha nasional Indonesia yang menganggap

Masalah internal, yaitu kenyataan bahwa Indonesia bukan lagi "surga" bagi investor asing. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan penegakan hukum, masalah perburuhan serta situasi sosial politik yang rentan terhadap gejolak. Sedangkan masalah eksternal terkait dengan kondisi ekonomi global. Ekonom dari IMF, Daniel Citrin mengemukakan bahwa ada tiga hal yang harus diperhatikan para pengambil kebijakan baik pada tingkat pusat maupun daerah di Indonesia untuk memperbaiki iklim investasi. Pertama, mengatasi kelemahan di sektor perpajakan dan regulasi. Pada level pemerintah daerah kebijakan pemberlakuan berbagai pungutan daerah baik dalam bentuk pajak daerah maupun retribusi kurang memperhatikan aspek kelayakan. Terkadang

sebuah kabupaten mengeluarkan perda tentang pungutan retribusi tanpa memahami pelayanan apa yang akan diberikan pada pengusaha yang sudah membayar retribusi tersebut. Ketidakjelasan regulasi adalah masalah lain dari peran pemerintah pusat maupun daerah dalam perekonomian. Ujung dari masalah ini adalah korupsi. Kedua, mendorong terciptanya fleksibilitas dalam pasar kerja. Akhir-akhir ini demonstrasi buruh demikian marak sehingga para pengusaha mulai mengeluh. Bahkan salah satu alasan Sony Corp. keluar dari Indonesia adalah karena masalah ini. Pengamat ekonomi dari UI, Chatib Basri mengemukakan fleksibilitas pasar kerja terkait dengan penentuan upah minimum dalam pasar kerja. Secara teoritis penentuan upah keseimbangan tergantung dari tarik menarik antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Namun, yang terjadi saat ini campur tangan pemerintah dalam penentuan upah keseimbangan terlalu besar sehingga pengusaha yang sudah mengalami kesulitan akibat krisis kembali mengalami kenaikan biaya produksi dari upah tenaga kerja. Ketiga, masalah hak milik intelektual dan hak kontrak. Harus diakui pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) termasuk hak paten di Indonesia masih rendah. Sebagai bukti adalah maraknya pembajakan terhadap hasil karya intelektual baik berupa buku, CD, kaset, VCD maupun paten atas produk. Komitmen pemerintah untuk mengatasi hal ini sangat rendah.

Kedua, rendahnya daya saing industri nasional. Menurut Sadli (2004), industri Indonesia mempunyai tiga masalah utama terkait dengan rendahnya daya saing ini, yaitu masalah struktural, munculnya pesaing baru (terutama dari RRC) dan proses transformasi politik dalam negeri yang menimbulkan instabilitas kondisi keamanan. Masalah struktural industri Indonesia adalah ketergantungan yang besar terhadap impor dan tidak ada dukungan dari *supplying industries*. Sebagai akibatnya pada saat krisis ekonomi lalu, banyak perusahaan di berbagai industri Indonesia mengalami kesulitan produksi karena

kenaikan harga bahan mentah yang diimpor. Munculnya pesaing dalam pasar internasional ternyata tidak diantisipasi dengan baik oleh pelaku industri nasional. Pada masa lalu, industri di Indonesia mengandalkan keunggulan kompetitifnya yaitu harga murah yang diperoleh dari murahnya upah buruh. Pemikiran untuk beroperasi secara efisien tidak pernah terpikirkan oleh pengusaha nasional, karena mereka terlalu dimanjakan oleh proteksi pemerintah. Porter (1985) mengemukakan sebuah model analisis kompetitif yang cukup terkenal. Model tersebut menyarankan sebuah perusahaan untuk melakukan analisis kompetitif terhadap lima aspek, yaitu persaingan antar perusahaan dalam industri itu sendiri, analisis kekuatan pembeli, analisis kekuatan *supplier*, analisis industri substitusi dan analisis terhadap munculnya pemain baru. Setiap perusahaan harus mempunyai analisis komprehensif terhadap kelima aspek tersebut sehingga mereka mampu mengantisipasi munculnya pesaing yang bisa mengganggu operasi bisnis perusahaan.

Realisasi investasi terutama investasi langsung masih dibutuhkan Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian. Namun, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatasi merosotnya angka investasi di Indonesia. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, pemulihan ekonomi nasional tidak akan terjadi bila kita tidak mampu menarik investor masuk kembali ke Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah nyata dalam mengantisipasi hal ini. Perbaikan terhadap iklim investasi harus dilakukan dengan kebijakan terpadu dalam bidang ekonomi dan industri dimana di dalamnya menyangkut masalah perpajakan, hukum dan moneter-fiskal.

Indikator ekonomi makro yang membaik adalah modal yang kuat dalam membangun iklim investasi. Sebagai contoh penurunan bunga SBI diharapkan akan menstimulir kredit investasi bagi sektor riil. Pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai 8 juta orang, bila ditambah dengan pengangguran tak kentara maka angka tersebut bertambah menjadi 40 juta

orang. Hal ini harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyusun kebijakan investasi. Berikutnya, pemerintah harus menyusun langkah nyata untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Beberapa kebijakan yang disarankan adalah debirokratisasi, pemberian fasilitas bebas pajak dan pemberantasan KKN. Urgensi debirokratisasi dikarenakan keluhan utama investor di Indonesia adalah pengurusan perijinan. Satu contoh kasus nyata yang dialami pengusaha jasa konsultan di Indonesia misalnya, untuk mengurus izin usaha dia harus menunggu selama 6 bulan, sementara dengan jenis usaha yang sama di Singapura hanya membutuhkan waktu 5 menit!. Pembebasan pajak atau *tax holiday* layak diberikan kepada investor yang bersedia menanamkan modalnya secara langsung artinya dia membangun pabrik di Indonesia. *Tax holiday* yang diberikan maksimal 5 tahun. Hal ini umum dilakukan di negara-negara yang ingin membangun iklim investasinya. KKN adalah masalah utama yang menyebabkan Indonesia tidak lagi menarik bagi investor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan PERC (*Political Economic Risk Consultancy*) pada Maret 2003, Indonesia menduduki peringkat teratas negara paling korup di Asia. Apapun kendalanya, masalah ini harus segera diatasi, penegakan hukum dan *political will* dari lembaga politik di Indonesia adalah kunci utama pemberantasan KKN.

Sebuah de-industrialisasi adalah kondisi terburuk dari kemunduran sektor industri. Hal ini ditandai dengan kemunduran sebagian besar industri sebuah negara. Indonesia belum mengalami hal seburuk itu, yang terjadi di Indonesia baru gejala awal saja. Ada beberapa sektor industri yang saat ini justru mengalami perkembangan dan pemulihan, misalnya UKM dan sektor properti dan bisnis penjualan eceran. Namun, bila gejala ini tidak ditangani akan berdampak buruk pada perekonomian nasional. Industri Indonesia yang mengalami kemunduran adalah industri yang padat karya sehingga dampaknya adalah pada meningkatnya angka pengangguran.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa investasi langsung dan ekspor berpengaruh positif terhadap GDP ternyata tidak didukung. Hal ini dikarenakan koefien regresi dari kesalahan ketidakseimbangan tidak signifikan secara statistik.
2. Pembahasan berdasarkan data juga menyatakan bahwa lambannya pertumbuhan ekspor dan buruknya iklim investasi merupakan penjelas dari ketidakmampuan model penelitian ini untuk menjelaskan fenomena ekspor dan investasi di Indonesia dalam jangka pendek maupun panjang.
3. Ketidakmampuan model ECM dari penelitian ini dalam menjelaskan masalah ekspor dan investasi langsung adalah salah satu gejala de-industrialisasi. Masalah ini masih erat kaitannya dengan perbaikan iklim investasi.

SARAN

Pemerintah harus mulai memperbaiki kebijakan ekspor dan iklim investasi, beberapa hal yang disarankan adalah:

1. Strategi makro yang meliputi perbaikan kondisi politik untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif, penetapan regulasi, restrukturisasi perbankan, proteksi secara terbatas, promosi ekspor, perbaikan masalah perburuhan, deregulasi dan perbaikan infrastruktur. Kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam prakteknya adalah meminimalkan praktek korupsi oleh birokrat yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Strategi mikro, yang terdiri dari penerapan standar kualitas yang tinggi, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern secara komprehensif dan konsisten serta pembentukan lembaga riset dan

pengembangan yang meliputi peningkatan inovasi produk serta mengembangkan merk sendiri. Penerapan standar kualitas tinggi inilah yang selama ini belum dilakukan oleh eksportir nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sri Tua (2001), *Indonesia Tanah Air Beta*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Blonigen, Bruce A, Christopher J Ellis dan Dietrich Fausten (2004). Industrial Groupings and Foreign Direct Investment, *Journal of International Economics* 65, pp 75-91.
- Chandra, Aditiawan (2001), Relokasi Industri Perusahaan Global di Negara Sedang Berkembang, *Manajemen Usahawan Indonesia*, Edisi Klasik II, No 10 Th XXX.
- Dollar dan Mary Halward-Driemeier (2000). Crisis, Adjustment, and Reform in Thailand's Industrial Firms, *The World Bank Research Observer*, vol 15 No. 1, pp 1-22.
- Dornbusch, Rudiger (1993), *Stabilization, Debt and Reform*, Harvester Wheatsheaf, Manchester.
- Garcia-Penalosa, Cecilia dan Stephen J. Turnovsky (2004). Production Risk and The Functional Distribution of Income in a Developing Economy: Tradeoffs and Policy Responses, *Journal of Development Economics* 76, pp 175-208.
- Granger, C.W.J dan P. Newbold (1974), Spurious Regressions in Econometrics, *Journal of Econometrics*, 2 pp 111-120.
- Gujarati, Damodar (2003). *Basic Econometrics*, Boston: McGraw Hill International.
- Hamid, Edy Suandi (1999), Peran dan Intervensi Pemerintah dalam Perekonomian, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol. 4 No.1.
- Insukindro (1991), Regresi Linear Lancung dalam Analisis Ekonomi: Suatu Tinjauan dengan Satu Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1 pp 88-23.
- Kasliwal, Pari (1995), *Development Economics*, Cincinnati, Ohio: South Western Publishing.
- Konings, Jozef dan Hylke Vandenbussche (2004). Antidumping Protection an Markups of Domestic Firms, *Journal of International Economics* 65, pp 151-165.
- Kotler, Philip dan Hermawan Kertajaya (2000), *Repositioning Asia, From Bubble to Sustainable Economy*, Singapore: John Wiley & Sons Asia.
- Kuncoro, Mudrajad (2000), *Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kwon, Yung Chul dan Michael Y Hu (2000), Market Orientation Among Small Korean Exporters, *International Business Review* 9, pp 61-75.
- Lipsey, Robert E dan Fredrik Sjöholm, (2004). Foreign Direct Investment, Education and Wages in Indonesian Manufacturing, *Journal of Development Economics* Vol. 73.
- Markusen, James R. (2001), Contracts, Intellectual Property Rights and Multinational Investment in Developing Countries, *Journal of International Economics*, Vol. 53.
- Porter, Michael E. (1985), *Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance*, New York: The Free Press.
- Sadli, Mohammad (2002), Beberapa Masalah dalam Ekonomi Makro, *Modul Pelatihan untuk Training Manajer BRI*, Jakarta.
- Sadli, Mohammad (2004), *Trade dan Industrial Policy di Indonesia*, *Koran Tempo*, edisi 2 Februari.
- Thomas, R. Leighton (1997), *Modern Econometrics*, England: AddisonWesley Longman.
- UNCTAD (2004), Prospects for FDI flows, TNC Strategies and Promotion Policies: 2004-2007, Publikasi Penelitian, www.unctad.org.

Utomo, Yuni P. (2001), Indonesia Tetap Bukan Ekspor Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Atau Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Ekspor, *Jurnal Manajemen Daya Saing* Vol 2 No 1, pp 79-93.

Zhu, Susan Chun dan Daniel Trefler (2004). Trade and Inequality in Developing Countries: A General Equilibrium Analysis, *Journal of International Economics* 65, pp 21-48.

Zulikfliemansyah (2004), Daya Saing dan de-Industrialisasi, *Harian Republika* edisi 25 Februari.